



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.782-BAPPEDA/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 365/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 356/Kep.351-Bappeda/2013, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk melakukan penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi, sehingga susunan organisasi dan keanggotaan pada Tim Koordinasi mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kota Bandung Tahun 2013 dengan berpedoman pada strategi pencegahan, strategi peraturan perundang-undangan, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan;
 2. berkoordinasi ...

2. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta instansi terkait dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kota Bandung Tahun 2013;
3. mendorong peran serta masyarakat dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kota Bandung Tahun 2013;
4. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kemajuan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kota Bandung Tahun 2013;
5. menyampaikan laporan atas pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kota Bandung Tahun 2013 kepada Walikota Bandung, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 356/Kep.351-Bappeda/2013 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2013.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung City (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.782-Bappeda/2013
TANGGAL : 19 Agustus 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA BANDUNG TAHUN 2013

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kota Bandung;
22. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
23. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

24. Kepala ...

24. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota
Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001